

Dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir

The dynamics of the socio-cultural life of coastal communities

Yuliana^{1*}

¹ Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 80224, Indonesia

*Corresponding author: yuliana@unud.ac.id

Submitted: 22 June 2021 Revised: 08 July 2021 Accepted: 14 July 2021 Publish: 31 July 2021

Abstrak

Manajemen sosial budaya pesisir yang terpenting adalah manajemen ekonomi nelayan. Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, seharusnya nelayan Indonesia memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang sejahtera. Namun, masih banyak kehidupan nelayan yang tergolong miskin. Untuk meningkatkan unsur sosial budaya komunitas nelayan di Indonesia, maka diperlukan etos wirausaha yang tinggi. Hal ini berhubungan dengan pengelolaan usaha perikanan laut. Aspek perencanaan jangka pendek maupun panjang harus disusun dengan detail. Pembinaan berkesinambungan diperlukan untuk menumbuhkan pemanfaatan sumber daya laut dengan lebih baik. Kondisi sosial terkait pula dengan kegiatan nelayan dalam suatu organisasi sosial. Keadaan budaya adalah penggunaan cara dan teknologi yang digunakan secara turun-menurun dalam menangkap ikan. Inovasi budidaya laut, memberikan kebebasan secara bertanggung jawab, serta penghargaan kepada hak-hak setiap orang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan manajemen sosial budaya pesisir. Transformasi sosial budaya akan memberikan arah pada transformasi ekonomi. Upaya yang diperlukan adalah peningkatan pengetahuan nelayan. Perusahaan sekitarnya hendaknya memberikan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Kebijakan pemerintah amat menentukan kesuksesan manajemen sosial budaya pesisir.

Keyword: manajemen, pesisir, sosial budaya

Abstract

The most important coastal socio-cultural management is the economic management of fishermen. As an archipelagic country, most of its territory consists of oceans, Indonesian fishermen should have a prosperous level of economic life. However, there are still many fishermen who are classified as poor. To improve the socio-cultural elements of the fishing community in Indonesia, a high entrepreneurial ethos is needed. This relates to the management of marine fisheries business. Aspects of short and long term planning must be prepared in detail. Sustainable development is needed to foster better utilization of marine resources. Social conditions are also related to the activities of fishermen in a social organization. Cultural conditions are the use of methods and technologies that have been used for generations to catch fish. Marine aquaculture innovation, providing freedom in a responsible manner, and respecting the rights of everyone can be done to improve the welfare and socio-cultural management of the coast. Socio-cultural transformation will give direction to economic transformation. The effort needed is to increase the knowledge of fishermen. The surrounding companies should provide business opportunities for local communities. Government policies will determine the success of coastal socio-cultural management.

Keywords: management, coastal, socio-cultural

PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, perairan di Indonesia sangat kaya akan sumber daya kelautan. Dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari laut (Imron & Wahyono, 2018). Sekitar 50% penduduk Indonesia bermukim di daerah pesisir. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Sekitar 75% wilayah Indonesia terdiri atas laut (Kristiyanti, 2016). Namun ironisnya, pendapatan nelayan masih rendah di beberapa daerah. Hal ini tergantung pada sistem bagi hasil dan alat penangkap ikan yang digunakan (Siskawati et al., 2016).

Penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan struktural karena kebijakan makro, fasilitas pembangunan, kebijakan moneter, fiskal, maupun hukum. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan karena tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, dan panutan (Kristiyanti, 2016).

Ruang lingkup yang dibahas di sini adalah manajemen sosial budaya nelayan. Dalam masalah sosial, nelayan

memiliki tingkat pendapatan yang berbeda sesuai dengan kapal dan alat yang dimilikinya. Dalam kondisi budaya, hal ini terkait dengan kebiasaan nelayan menggunakan alat khusus yang dimilikinya. Nelayan harus mau berusaha beradaptasi dengan teknologi baru untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Padahal potensi lautan yang menjanjikan, seharusnya menjadikan nelayan memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik (Wahyuni et al., 2019).

Kondisi budaya nelayan terkait dengan kebiasaan melaut. Budaya merupakan seluruh pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu anggota masyarakat. Ketrampilan melaut umumnya diturunkan oleh keluarga nelayan. Hal ini terbukti dalam penelitian yang dilakukan di desa Puger Wetan, Jember (Fitriyah & Widodo, 2016). Jika yang diturunkan adalah hal-hal baik, maka akan membawa hasil yang baik. Oleh karena itu, diupayakan ada transformasi sosial budaya ke arah yang lebih baik dan maju.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan tinjauan pustaka. Literatur yang digunakan diambil dari *Google Scholar* dengan

menggunakan kata kunci sosial, budaya, nelayan, manajemen, pendapatan. Literatur yang diperoleh diskriming berdasarkan judul dan abstrak untuk mendapatkan artikel yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu artikel 10 tahun terakhir dan berupa artikel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi sosial nelayan

Kondisi sosial nelayan terkait dengan keterlibatan nelayan dalam organisasi sosial di sekitarnya dan juga tingkat pendapatan nelayan. Organisasi yang diikuti oleh nelayan umumnya terkait pekerjaan dan organisasi keagamaan. Organisasi ini untuk memudahkan koordinasi jika ada kegiatan antar nelayan, juga interaksi nelayan dan pemerintah (Fitriyah & Widodo, 2016).

Pendapatan nelayan ini dipengaruhi oleh sistem bagi hasil. Alat yang digunakan juga akan mempengaruhi besarnya pendapatan. Umumnya nelayan pemilik kapal akan mendapat hasil 75%, sedangkan nelayan pekerja (anak buah kapal/ABK) mendapatkan 25% setelah semua biaya itu dikurangi biaya operasional. Namun jika pekerja berjumlah dua orang maka sistem bagi hasil menjadi 50% pemilik,

50% ABK. Demikian pula jika ABK lebih dari dua, pembagian tersebut menjadi ABK 60% dan pemilik 40% (Siskawati et al., 2016). ABK ini kadang disebut juga sebagai nelayan buruh (Fatmasari, 2014).

Secara umum, ada empat tingkatan nelayan, yaitu (Fatmasari, 2014):

1. Untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Mereka menggunakan alat tangkap tradisional, seperti dayung atau sampan tidak bermotor. Anggota keluarga adalah tenaga kerja utama.
2. *Post-peasant fisher*, nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Nelayan sudah berorientasi pasar dan dapat menangkap ikan lebih jauh sehingga hasilnya lebih banyak. Tenaga kerja bisa melibatkan di luar anggota keluarga.
3. *Commercial fisher*, nelayan yang berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah besar. Jumlah tenaga kerja banyak. Teknologi modern dan kapal besar.
4. *Industrial fisher*, menggunakan sistem agroindustri seperti di negara maju.

Rata-rata pendapatan nelayan pemilik dengan alat tangkap jaring

insang yaitu sebesar Rp.138.375.060 per tahun dan rata-rata pendapatan nelayan dengan alat tangkap bubu sebesar Rp.92.726.962 per tahun (Siskawati et al., 2016). Namun nilai pendapatan ini akan berbeda jika menggunakan alat yang berbeda dan lokasi berbeda. Nelayan yang menggunakan pancing tonda memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp. 5.825.923,- per bulan, sedangkan pendapatan nelayan pancing rawai adalah Rp.4.738.040,- per bulan di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Mas'ud et al., 2018).

Perbedaan pendapatan tersebut karena tangkapan yang diterima oleh nelayan jaring insang lebih banyak dibandingkan nelayan bubu. Faktor lainnya yang mempengaruhi perbedaan pendapatan adalah perbedaan kekuatan mesin kapal, dan perbedaan biaya operasional yang dikeluarkan (Siskawati et al., 2016). Lama melaut dan ukuran kekuatan mesin tempel akan mempengaruhi pendapatan nelayan (Rahim et al., 2018).

Kondisi budaya nelayan

Keadaan budaya adalah penggunaan cara dan teknologi yang

digunakan secara turun-menurun dalam menangkap ikan. Inovasi budidaya laut, memberikan kebebasan secara bertanggung jawab, serta penghargaan kepada hak-hak setiap orang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan manajemen sosial budaya pesisir. Ciri khas sosial budaya masyarakat pesisir adalah (Fama, 2016):

1. Terdapat interaksi sosial yang intensif antara warga masyarakat. Hal ini ditandai dengan seringnya tatap muka sehingga hubungan kekeluargaan sangat erat. Mereka saling bersimpati dan membantu satu sama lain.
2. Mereka saling bergotongroyong, terutama dalam hal menangkap ikan baik dalam cara penangkapan maupun dalam penentuan daerah penangkapan.

Kondisi budaya ini terkait juga dengan adat budaya setempat. Ada istilah hak ulayat laut. Hak ini mengandung arti bahwa ada klaim atas wilayah laut oleh desa yang disebut petuanan laut. Contoh penerapannya adalah di Maluku dan Papua. Pada bagian tertentu dari petuanan laut juga, terdapat sumber daya yang berada di kawasan tertentu yang dilindungi dengan sistem sasi. Sistem ini

merupakan larangan menangkap sumber daya tertentu pada waktu yang telah ditentukan (Imron & Wahyono, 2018).

Tidak ada batas tegas wilayah laut yang diklaim oleh suku di Maluku dan di Papua. Batas di tengah laut adalah sejauh mata memandang. Ini berbeda dengan batas daratan yang berupa pohon ataupun sungai. Batas di laut hanya berupa garis imajiner, sehingga sering terjadi konflik karena perbedaan persepsi. Hal ini bisa diatasi dengan musyawarah kekeluargaan di antara organisasi (Imron & Wahyono, 2018).

Di Sulawesi Utara, hak ulayat laut ini tergantung pada pengelolaan wilayah dan jenis ikan. Di Desa Salurang, nelayan menggunakan sistem malombo. Penangkapan ikan tude di wilayah nyare hanya boleh dilakukan bersama dengan seorang pemimpin desa. Di Pulau Para ditemukan dua wilayah penangkapan. Wilayah penangkapan seke dan soma tatenda memiliki batas sendiri, jika memancing di wilayah yang berbeda akan diberi sanksi adat keras (Imron & Wahyono, 2018).

Di Aceh, hak ulayat diatur oleh hukum yang disebut lhok dan/atau muara. Wilayah ini bisa terdiri dari satu

atau beberapa desa/gampong. Ada hukum adat laok untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan. Pemimpinnya adalah panglima laot lhok (Imron & Wahyono, 2018).

Praktik hak ulayat laut ini baik untuk memupuk kebersamaan dan lebih mudah mengatasi konflik. Masyarakat setempat yang lebih mengetahui kondisi laut sekitarnya. Hal ini dapat menghindari eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. Dengan demikian, keseimbangan ekosistem akan lebih terjaga. Biaya manajemen relative lebih murah karena dikelola masyarakat sendiri (Imron & Wahyono, 2018).

Realitas pengelolaan sumber daya laut berdasarkan adat setempat ini perlu diperhatikan pemerintah. Tujuannya adalah supaya terjadi keseimbangan dan pemerataan yang adil. Pengelolaan yang baru akan melahirkan harapan yang baru. Transformasi sosial budaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan (Imron & Wahyono, 2018).

Transformasi sosial budaya terkait aspek ekonomi nelayan

Transformasi sosial budaya ini terkait dengan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh nelayan. Secara umum, musim penangkapan ikan terbagi menjadi tiga musim, yaitu musim puncak, peralihan dan paceklik. Musim puncak (musim panen raya) berlangsung dari bulan Februari/Maret-Juni/Juli. Pada musim ini, hasil tangkapan paling banyak. Musim timur dan selatan disebut musim peralihan (Agustus-November). Pada musim ini aktivitas melaut sudah sedikit dikurangi karena hasil tangkapan yang cukup sulit didapatkan. Musim barat adalah musim paceklik, karena arus laut berkecepatan tinggi dan angin kencang dari arah yang berlawanan diikuti badai. Hal ini menyebabkan nelayan mengurangi aktivitas melautnya. Jika dipaksa melaut akan berdampak pada keselamatan, resiko kerusakan perahu yang cukup tinggi dan produksi hasil tangkapan yang diperoleh. Pada musim paceklik (Desember-Januari/Februari), nelayan hendaknya melakukan aktivitas lain seperti memperbaiki jaring ataupun mengolah ikan yang sudah ditangkap sehingga lebih bernilai ekonomis. Diversifikasi pekerjaan juga dapat dilakukan (Mas'ud et al., 2018; Wahyuni et al., 2019).

Pengelolaan sumber daya alam masyarakat pesisir umumnya secara tradisional, antara lain (Fama, 2016):

1. Pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan
2. Struktur pihak yang terlibat sangat sederhana;
3. Bentuk pemanfaatan dalam skala kecil;
4. Tipe masyarakat dan kegiatannya relatif homogen;
5. Komponen pengelolaannya dari dan untuk masyarakat
6. Rasa kepemilikan dan ketergantungan terhadap sumberdaya alam tinggi.

Peran serta Pemerintah untuk transformasi kehidupan sosial budaya nelayan

Untuk transformasi sosial budaya dalam peningkatan pendapatan nelayan, maka seyogyanya diadakan Tempat Pelelangan Ikan sedekat mungkin dengan lokasi penangkapan. Hal ini supaya produksi, pasca panen, pengolahan serta pemasaran ikan hasil tangkapan lebih cepat dan kualitas ikan masih segar. Nelayan harus belajar cara mengolah, memasarkan, mengawetkan ikan, serta membina dan mengembangkan tempat usahanya

secara mandiri (Fama, 2016). Pemerintah juga diharapkan sering memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada nelayan dan istri mereka sehingga istri nelayan kecil dapat memberikan kontribusi untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga (Fitriyah & Widodo, 2016).

Potensi besar yang dimiliki oleh nelayan dan masyarakat pesisir dapat dimanfaatkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah membentuk kelompok pengawasan masyarakat (Pokwasmas) di setiap desa pesisir. Hal ini untuk mencegah kerusakan lingkungan laut dan mencegah terjadinya penyelundupan manusia lewat jalan laut maupun imigran gelap. Kelompok ini juga disebut Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (Imron & Wahyono, 2018).

Pemerintah perlu memberikan bantuan kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan riil nelayan berdasarkan kondisi heterogenitas nelayan. Pengembaliannya disesuaikan dengan pola kerja nelayan yang pada musim tertentu tidak bisa melaut. Namun hal ini terkendala dengan aturan perbankan (Imron & Wahyono, 2018).

Hak pengusahaan pesisir (HP-3) mendapatkan perlawanan. Hal ini

karena kepentingan ekonomi dan politik masih mewarnai kebijakan tersebut. Seharusnya yang ditonjolkan adalah hak pengelolaan. Prioritas adalah pada masyarakat hukum adat yang telah terbukti berhasil melakukan pengelolaan wilayah laut di sekitarnya. Penghapusan HP-3 adalah bagian dari upaya untuk memberdayakan nelayan, terutama nelayan kecil. Pengentasan kemiskinan supaya dilakukan secara menyeluruh dalam berbagai aspek, mulai dari yang bersifat fisik seperti alat tangkap ikan atau mesin perahu, sampai dengan yang bersifat kelembagaan, termasuk aspek pemasarannya (Imron & Wahyono, 2018).

ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*) adalah pendekatan yang mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai. ICZM disebut juga Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT). Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat secara adil dan proposional, memberdayakan masyarakat pesisir, dan mengatasi masalah pembangunan pesisir serta lautan di masa ini maupun yang akan datang. Pengelolaan ICZM melibatkan penelitian bersama masyarakat (Kristiyanti, 2016).

Alternatif pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu (Kristiyanti, 2016):

1. Menciptakan lapangan kerja alternatif
2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal
3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru
4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar
5. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat

ICZM memiliki beberapa konsep dimensi, yaitu (Kristiyanti, 2016):

a. Dimensi ekologis

- Mengelola kegiatan pembangunan wilayah pesisir dan daerah sekitarnya agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsional yang ada.

- Jika ada pembuangan limbah di wilayah pesisir, maka harus ada jaminan bahwa total pembuangan limbah tidak melebihi batas asimilasi

b. Dimensi sosial-ekonomi

Pola dan laju pembangunan harus dikelola supaya total permintaan sumber daya alam dan jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan suplai yang ada.

c. Dimensi sosial-politik

Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik yang demokratis dan transparan.

Segi positif ICZM adalah (Kristiyanti, 2016):

1. Memberi kesempatan kepada masyarakat pesisir untuk membangun sumber daya secara berkesinambungan.
2. Memberikan pertimbangan tentang kebutuhan terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang ke dalam perencanaan pembangunan
3. Meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut.
4. Membantu pemerintah daerah maupun pusat untuk mengembangkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Pengelolaan wilayah pesisir ini adalah tanggungjawab bersama secara berkelanjutan meliputi usaha internasional, lokal, para pengguna wilayah pesisir, penduduk, perusahaan swasta, dan pemerintah. Kemitraan ini perlu dijalin untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan bersama-sama. Pengelolaan wilayah akan berhasil jika tetap memegang

teguh tradisi lokal. Evaluasi dan monitor harus terus dilakukan (Kristiyanti, 2016).

KESIMPULAN

Manajemen sosial budaya pesisir berkaitan dengan kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. Langkah transformasi sosial budaya untuk memperbaiki ekonomi adalah dengan manajemen dan perencanaan yang baik. Pada masa paceklik saat sulit melaut karena cuaca kurang baik di bulan Desember sampai Februari, maka nelayan harus lebih kreatif dalam mengolah dan mengawetkan ikannya dengan baik sehingga bernilai ekonomis tinggi. Diversifikasi pekerjaan juga diusahakan untuk meningkatkan pendapatan terutama dalam masa paceklik.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan pada penyusunan manuskrip ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fama, A. 2016. Komunitas Masyarakat Pesisir di Tambak Lorong, Semarang. *Sabda*, 11(2), 65–75.
- Fatmasari, D. 2014. Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Amwal Jurnal*

Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 6(1), 144–166.

- Fitriyah, K., & Widodo, D. 2016. Karakteristik sosial budaya dan ekonomi nelayan kecil di wilayah pesisir desa puger wetan kecamatan puger kabupaten jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 10(1), 1–13.
- Imron, M., & Wahyono, A. 2018. Penelitian Sosial Budaya Maritim pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI dan Sumbangannya pada Kebijakan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 20(1), 123–142.
- Kristiyanti, M. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 2016 Di Semarang, Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya*, 752–760.
- Mas'ud, R. M., Baso, A., & Adhawati, S. S. 2018. Analisis Perbandingan Pendapatan Nelayan Tangkap Pancing Tonda dan Pancing Rawai di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. *Journal of Fisheries and Marine Science*, 2(December 2018), 44–51.
- Rahim, A., Hastuti, D. R. ., Syahma, A., & Firmansyah. 2018. Pengaruh Lama Melaut, Kekuatan Mesin Tempel, dan Karakteristik Responden Terhadap Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional di Kabupaten Takalar. *Agrisociomics Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(1), 50–57.
- Siskawati, D., Rizal, A., Padjadjaran, U., & Ratio, B. C. 2016. Analisis Pendapatan Nelayan Jaring Insang Tetap dan Bubu di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. *Jurnal Perikanan Kelautan*, VII(2), 9–13.
- Wahyuni, S., Zakaria, W. A., & Endaryanto, T. 2019. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan di Pesisir Kota Agung Kabupaten Tanggamus. *JIIA*, 7(4), 443–45